

**OPINI MASYARAKAT TENTANG PEMBERITAAN
PERSETERUAN KPK dan POLRI DI MEDIA TELEVISI
(Studi Kasus Pada Pemberitaan Calon Tunggal Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Budi Gunawan)**

Nurul Fatia, Yuanita Setyastuti, Muhammad Alif
Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Nurul Fatia, D1C111020, 2015. Opini masyarakat tentang pemberitaan perseteruan KPK dan POLRI di media televisi (Studi Kasus Pemberitaan Calon Tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Budi Gunawan). Dibimbing oleh Yuanita Setyastuti, S. IP., M.Si dan Muhammad Alif, S.Sos., M.Si.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui opini masyarakat di Kota Banjarmasin tentang pemberitaan KPK dan POLRI pada kasus Calon Tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Budi Gunawan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif. Sampel diambil sebanyak 348 masyarakat di Kota Banjarmasin. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Area Cluster Sampling*. Teknik pengumpulan data adalah angket atau kuisioner. Teknik analisa data dengan menggunakan analisa tabel tunggal.

Hasil penelitian menunjukkan Opini masyarakat dalam indikator *Belief*, mayoritas responden sebanyak 225 atau 64,5% percaya terhadap informasi pemberitaan perseteruan KPK dan POLRI di media televisi dan kinerja kedua lembaga hukum KPK dan POLRI. Opini masyarakat dalam indikator *Attitude*, mayoritas responden sebanyak 177 atau 51% menyatakan sikap positif terhadap pemberitaan pencalonan tunggal Kepolisian Republik Indonesia Budi Gunawan. Sedangkan Opini masyarakat indikator *Perception*, mayoritas responden sebanyak 189 atau 54,3% menyatakan tidak setuju dengan pencalonan tunggal Kepolisian Republik Indonesia tanpa melibatkan KPK-PPATK dan pemberitaan di media televisi yang menyatakan Budi Gunawan mantan ajudan Megawati.

Kata Kunci : Opini Masyarakat, Pemberitaan KPK dan POLRI

PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat akan informasi semakin tinggi. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai media yang menyajikan beragam informasi mulai dari media cetak, media elektronik bahkan media online. Media elektronik seperti televisi sangat diminati oleh masyarakat. Televisi sebagai media massa sangat memanjakan publiknya,

karena tinggal memandang dan mendengar (Laksono, 1997).

Program berita menjadi identitas khusus atau identitas lokal yang dimiliki suatu Stasiun Televisi. Program berita menjadi bentuk kewajiban dan tanggung jawab pengelola televisi kepada masyarakat yang menggunakan gelombang udara publik (Morrisan, 2010:2).

Pada Januari 2015, pemberitaan perseteruan KPK dan POLRI di media televisi seiring pencalonan tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Polisi Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Kapolri Jendral Sutarnan. Budi Gunawan mengalahkan kandidat Kapolri Komjen Badrodin Haiti, Komjen Dwi Priyatno, Komjen Suhardi Alius dan Komjen Putut Eko Bayuseno yang diajukan oleh Komisi Kepolisian Nasional. (Sumber: Metro Siang edisi 11 Januari 2015).

Beberapa saat diumumkan pencalonan tunggal Kapolri, pada 12 Januari 2015, KPK menyatakan Budi Gunawan terlibat kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji menduduki Kepala Biro Pembinaan Karir Deputy Sumber Daya manusia Mabes POLRI dan ditetapkan sebagai tersangka. Abraham Samad memaparkan Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka karena tim penyidik KPK menemukan transaksi yang tidak wajar atau yang sering disebut dengan "rekening gendut". Selain itu Budi Gunawan saat dicalonkan sebagai daftar menteri sudah menjadi catatan merah KPK. (Sumber: Breaking News Metro Tv edisi 13 Januari 2015).

Setiap stasiun televisi menyiarkan berita KPK dan POLRI dengan sudut pandang yang berbeda. Masyarakat dengan mudah mendapatkan dan memilih informasi mana yang layak untuk diterima. Permasalahan

kontroversial akan memunculkan berbagai pendapat yang bersifat mendukung, menentang atau berlawanan dari masyarakat. Hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan di dalam masyarakat yang demokratis akan membentuk opini publik (Helena Olli dan Novi Erlita, 2011: 22).

Opini mulai terbentuk ketika ada suatu masalah kontroversial dan tidak umum yang muncul di berbagai media. Media massa memiliki kemampuan dalam membeberkan suatu fakta bahkan membentuk opini masyarakat. Media massa mampu menggiringi masyarakat untuk beropini terhadap hal yang diberitakan.

Berita yang ditampilkan keluar oleh media massa merupakan cara efektif pembentukan opini atau pendapat umum. Sudah dapat dipastikan bahwa setiap topik-topik berita yang dipublikasikan oleh berbagai media massa itu mengandung pembentukan opini. Melalui berita-berita atau pendapat yang berkembang, mempunyai pengaruh terhadap pandangan seseorang bisa diartikan berita-berita yang dipublikasikan itu dapat membentuk opini masyarakat

(Ruslan, 2008:66-75).

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian tentang Opini Masyarakat tentang Pemberitaan Perseteruan KPK dan POLRI pada kasus Calon Tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Budi Gunawan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *cluster sampling* pada masyarakat di Kota Banjarmasin. Banjarmasin memiliki jumlah

penduduk yang besar dan menurut Pengukuran Elektronik Teknologi meter dengan GSM (*Global System for Mobile*) dan GPRS (*General Packet Radio Service*) oleh *Nielsen Audience Measurement* tahun 2013, Banjarmasin masuk ke dalam 10 kota Besar di Indonesia yang menggunakan media televisi sebagai sumber informasi. (Sumber: Tempo.com edisi 06 Maret 2013).

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Opini Masyarakat tentang pemberitaan Perseteruan KPK dan POLRI pada kasus Calon Tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Budi Gunawan. Sedangkan tujuan penelitian adalah penelitian untuk mengetahui opini masyarakat di Kota Banjarmasin tentang pemberitaan perseteruan KPK dan POLRI pada kasus Calon Tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Budi Gunawan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode Kuantitatif dinamakan metode positivis karena belandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode Kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono 2013:7).

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Kuantitatif.

Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini lebih menekankan pada pengujian-pengujian dari teori yang sudah mapan dan penggalian data

menggunakan angket/kuisisioner karena akan mengetahui gambaran opini Masyarakat tentang pemberitaan Perseteruan KPK dan POLRI pada kasus Calon Tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Budi Gunawan dalam bentuk angka.

Jenis Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya dan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Penelitian dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini (M. Idrus 2009:23).

Peneliti memilih jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan tentang opini masyarakat tentang pemberitaan Perseteruan KPK dan POLRI pada kasus Calon Tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Budi Gunawan.

Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul Opini Masyarakat tentang Pemberitaan Perseteruan KPK dan POLRI pada kasus Calon Tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Budi Gunawan akan diadakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Populasi dan Sample

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyon, 2013:8081). Jadi populasi adalah seluruh anggota

yang terhubung di dalam sebuah objek yang akan dijadikan sebagai bagian dari penelitian. Peneliti akan mengambil populasi seluruh Warga di Banjarmasin.

Cluster Sampling (Area Sampling)
Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu Negara, Provinsi atau Kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan (Sugiyono 2011:82). Teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling.

Untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael dalam (Sugiono 2012:86), dengan tingkat kesalahan 5%.

Teknik pengumpulan data

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono 2013:142).

Dalam angket penelitian, peneliti menggunakan skala Guttman karena skala pengukuran tipe ini akan didapat jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Pemberian Skor untuk indikator Opini Masyarakat dengan bobot nilai untuk setiap pertanyaan yang mendukung (*favorable*) dari 1 hingga 0 dengan Ya 1

dan Tidak 0. Bobot nilai untuk setiap pertanyaan yang bersifat tidak mendukung (*unfavorable*) bergerak dari 0 hingga 1 dengan YA 0 dan Tidak 1.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data yang digunakan adalah analisa tabel tunggal yang merupakan suatu analisa yang dilakukan dengan membagi-bagikan variabel penelitian ke dalam kategori-kategori yang dilakukan atas dasar frekuensi. Tabel tunggal merupakan suatu langkah awal dalam menganalisa data yang terdiri dari kolom, yaitu sejumlah frekuensi dan persentase untuk setiap kategori. Adapun setelah data terkumpul akan ditabulasi kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Sebelum disebarkan ke responden kuesioner dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu.

Teknik Pengolahan Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

- a. Pengklasifikasian data yaitu, tahap kegiatan menggolongkan aneka ragam jawaban ke dalam kategori-kategori.
- b. Koding, yaitu usaha mengklasifikasikan jawabanjawaban responden dengan jalan menandai masing-masing kode tertentu dengan menggunakan angka.
- c. Tabulasi, yaitu usaha penyajian data, terutama pengolahan data

yang akan menjurus ke analisis kuantitatif.

Untuk menghitung presentase per sub variabel digunakan penjabaran di atas menjadi sebagai berikut: $P = \frac{F}{N} \times 100\%$

Keterangan:

P = Persentase F = Frekuensi

yang sedang dicari persentasenya

N = banyaknya responden (Anas Sudijono, 2010:43).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pada indikator *Belief* yaitu pengetahuan masyarakat terhadap pemberitaan perseteruan KPK dan POLRI, ketidaksesuaian informasi yang disajikan media televisi dengan fakta dilapangan, kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan media televisi, kepercayaan masyarakat akan kinerja KPK dan POLRI sebanyak 64,7% menjawab Ya/Percaya.

Pada indikator *Attitude (Affect dan Cognitif)* yaitu pemberitaan perseteruan KPK dan POLRI mempengaruhi emosional masyarakat, kecewa dan marah dengan sikap KPK dan POLRI yang saling menyalahkan, perseteruan KPK dan POLRI mampu merubah penilaian terhadap 2 lembaga hukum tersebut, pencalonan tunggal yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo itu salah, sikap pemerintah terlalu gegabah saat menentukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, tidak sependapat mengenai pernyataan media televisi bahwa Budi Gunawan telah lulus dalam Uji Kelayakan. Rata-rata mayoritas

masyarakat menjawab Ya atau menyatakan sikap positif terhadap pemberitaan pencalonan tunggal pada indikator *Attitude* sebanyak 67,6%.

Pada indikator *Perception* yaitu pencalonan tunggal Kapolri tanpa melibatkan KPK dan PPATK, tindakan Joko Widodo dalam menggunakan Hak Prerogatif untuk memilih calon tunggal Kapolri, pemberitaan di media televisi yang menyatakan Budi Gunawan merupakan mantan ajudan Megawati, tindakan KPK yang menyatakan Budi Gunawan terlibat Tindak Pidana Korupsi, KPK melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung, tindakan partai politik yang menyalahkan KPK dalam kasus Budi Gunawan, kritik publik bahwa Presiden Joko Widodo harus melibatkan KPK dalam setiap memilih Menteri dan Kandidat

Kapolri serta Presiden didesak untuk mengusulkan calon Kapolri baru setelah Budi Gunawan dinyatakan tidak bersalah di peradilan. Rata-rata mayoritas masyarakat menjawab tidak setuju dengan pencalonan tunggal kapolri pada indikator *perception* sebanyak 54,3%.

PEMBAHASAN

Opini mulai terbentuk ketika ada suatu masalah kontroversial dan tidak umum yang muncul di berbagai media. Media massa memiliki kemampuan dalam menyajikan suatu fakta bahkan membentuk opini masyarakat. Media massa mampu menggiringi masyarakat untuk beropini terhadap hal yang diberitakan.

Berita yang ditampilkan keluar oleh media massa merupakan cara efektif pembentukan opini atau pendapat umum.

Sudah dapat dipastikan bahwa setiap topik-topik berita yang dipublikasikan oleh berbagai media massa itu mengandung pembentukan opini. Melalui berita-berita atau pendapat yang berkembang, mempunyai pengaruh terhadap pandangan seseorang bisa diartikan berita-berita yang dipublikasikan itu dapat membentuk opini masyarakat.

Opini dari perorangan tersebut kemudian secara akumulasi dapat berkembang menjadi suatu konsensus (kesepakatan) dan terkristalisasi jika masyarakat dalam kelompok tertentu

mempunyai kesamaan dalam visi, ide, nilai-nilai yang dianutnya, latar belakang dan hingga tujuan yang hendak dicapai dikemudian hari akan terbentuk opini publik. (Ruslan, 2006:68).

Dalam bagan proses pembentukan opini digambarkan bagaimana persepsi seseorang yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pengalaman-pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut dan berita yang sedang berkembang pada akhirnya membentuk opini publik. Proses inilah yang akan melahirkan suatu interpretasi suatu opini publik apakah nantinya bersifat mendukung, menentang atau berlawanan. (Ruslan, 2006:68).

1. Opini Masyarakat Indikator *Belief*

Pada Item 1 indikator *Belief*, pemberitaan di media televisi mengenai perseteruan KPK dan POLRI pada kasus Pencalonan Tunggal Kepolisian Republik Indonesia Budi Gunawan sangat menarik bagi masyarakat.

Perseteruan kedua lembaga penegak hukum merupakan suatu masalah yang kontroversi, sehingga masyarakat memiliki rasa ingin tahu yang kuat terhadap pemberitaan perseteruan KPK dan POLRI tersebut yang ditunjukkan dengan persentasi 100% atau sebanyak 348 responden menyatakan mengetahui pemberitaan tersebut melalui media televisi.

Media televisi merupakan media yang memiliki daya penyampaian dan pengaruh yang kuat karena dapat memberikan kombinasi antara suara gambar sehingga masyarakat lebih mudah mengerti dengan informasi yang disampaikan. Selain itu dalam kasus KPK dan POLRI media televisi menyajikan pemberitaan secara berkelanjutan. Menurut Pengukuran Elektronik Teknologi meter dengan GSM (*Global System for Mobile*) dan GPRS (*General Packet Radio Service*) oleh *Nielsen Audience Measurement* tahun 2013,

Banjarmasin masuk ke dalam 10 kota Besar di Indonesia yang menggunakan media televisi sebagai sumber informasi.

Pada Item 2 indikator *Belief*, responden menyatakan pemberitaan yang disajikan media televisi mengenai perseteruan KPK dan POLRI tidak sesuai dengan fakta dilapangan, hal ini ditunjukkan oleh 184 responden dengan 52,9%. Selain itu pada item 3, informasi dalam pemberitaan perseteruan KPK dan POLRI di media televisi sebanyak

177 responden atau 50,9% menyatakan tidak percaya dengan informasi yang disampaikan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan masyarakat

menganggap media televisi lebih mengutamakan kepentingan kelompok politik semata tanpa memikirkan kepentingan khalayak. Pemberitaan yang berkaitan dengan politik dianggap tidak murni dengan yang terjadi dilapangan.

Hal ini berkaitan dengan pesatnya perkembangan media massa yang menjadikan media tidak lagi sebagai institusi yang ideal dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang sebagai alat sosial, politik, budaya dan fungsinya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Tetapi telah berubah menjadi institusi yang menjanjikan secara ekonomi bagi para pengusaha.

Kepentingan pemilik media yang mampu menggiring opini masyarakat terhadap suatu realitas.

Pemilik media mampu mempengaruhi masyarakat dengan media yang dimilikinya dan tidak jarang beberapa media memiliki konten informasi yang sama. Konglomerasi media yang membuat masyarakat tidak percaya terhadap informasi yang disampaikan di media televisi, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mencari media yang benar-benar netral dan bertanggung jawab.

Pada item 4 dan 5 indikator *Belief*, pemberitaan KPK dan POLRI di media televisi sebanyak 61,8% atau 215 responden menyatakan tidak percaya akan kinerja KPK dan sebanyak 65,5% atau 228 responden tidak percaya akan kinerja penegak hukum POLRI setelah kedua lembaga hukum tersebut terlibat kasus perseteruan. Hal ini dikarenakan kasus perseteruan tersebut sejak tahun 2008 hingga 2015 belum terselesaikan

dan pemicu utama konflik tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan politik kedua lembaga penegak hukum tersebut (Sumber : Kompas.com edisi 2 february 2015).

Media massa mampu membuat pencitraan terhadap KPK dan POLRI dengan mengarahkan kepada pemberitaan-pemberitaan. Media massa mampu menyudutkan kedua lembaga penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh penegakan hukum. Sehingga masyarakat dengan adanya pemberitaan di media televisi secara terus menerus akan muncul ketidakpercayaan terhadap KPK dan POLRI serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap substansi dan struktur hukum. Kasus-kasus tersebut tidak diatasi dengan baik dan tepat akan menimbulkan konsensus dan opini publik yang berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat pada citra, etika profesional atau sistem pengelolaan. (Ruslan, 2006:75)

2. Opini Masyarakat Indikator *Attitude*

Pada Item 6 indikator *Attitude (Affect)*, perseteruan kedua lembaga hukum tersebut mempengaruhi emosional responden dengan persentasi 63,2% atau 220 responden. Hal ini dikarenakan 2 lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi pilar penegakan hukum di Indonesia justru berseteru. Selain itu perseteruan ini akan melemahkan KPK dan merusak wibawa POLRI. Komponen *affect* (perasaan atau emosi) muncul sebagai akibat setelah merasakan atau timbul setelah melihat dan mendengarkan sesuatu.

Pada item 7 dan 8 indikator *Attitude (affect)*, responden merasa kecewa/marah dengan sikap KPK dengan persentasi 70,4% dan POLRI dengan persentasi 71% yang saling menyalahkan satu sama lain saat pencalonan tunggal Kapolri Budi Gunawan. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan di media massa bahwa ke dua lembaga penegak hukum tersebut saling menjerat dengan laporan perkara masa lalu.

Pada Item 9 indikator *Attitude (Cognition)*, dengan adanya pemberitaan perseteruan KPK dan POLRI di media televisi mampu merubah penilaian masyarakat terhadap kedua lembaga tersebut dengan jawaban 67,5%. Pandangan miring terhadap POLRI terkait erat dengan kepentingan pribadi dan politik yang sangat kuat terlihat sebagaimana persoalan Budi Gunawan sedangkan mayoritas masyarakat menilai baik KPK dan memiliki persepsi kepercayaan publik yang meningkat. Melalui berita-berita atau pendapat yang berkembang akan mempunyai pengaruh terhadap pandangan seseorang terhadap kedua lembaga tersebut. Selain itu, akan muncul penilaian baik dan buruk masyarakat terhadap kedua lembaga tersebut. (Ruslan, 2008: 66-75).

Pada Item 10 indikator *Attitude (Cognition)*, sebanyak 65,5% atau 228 responden mengatakan salah jika Pencalonan Tunggal Kapolri dipilih langsung oleh presiden Joko Widodo dengan Hak Prerogatifnya. Hak Prerogatif adalah hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada seseorang atau penguasa suatu negara

dan diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Presiden memiliki hak prerogatifnya dalam Pasal 11 ayat (1) UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 yang isinya “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Dalam mengusulkan nama calon Kapolri kepada DPR RI, Presiden mempertimbangkan usulan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Hal ini dikukuhkan dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 yang secara jelas menyatakan bahwa tugas Kopolnas antara lain memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dari proses tersebut, dapat dipahami bahwa nama calon Kapolri telah melalui proses setidaknya oleh 3 institusi/lembaga yaitu dari Kopolnas, kemudian presiden sendiri sebagai lembaga Eksekutif dan DPR RI sebagai lembaga Legislatif.

Hak prerogatifnya presiden dianggap masyarakat telah dipengaruhi oleh partai-partai politik tertentu yang termasuk dalam Koalisi Indonesia Hebat. Sehingga masyarakat pencalonan tunggal oleh presiden Joko Widodo dianggap salah. Hal ini diperkuat dengan pemberitaan media televisi yakni Metro TV yang merupakan milik tokoh politik yang mendukung penuh pencalonan tunggal Kapolri dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri lewat Editorialnya.

Pada Item 11 indikator *Attitude (Cognition)*, sebanyak 69,5% atau 242 responden menyatakan sikap pemerintah terlalu gegabah saat menentukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepolisian Republik Indonesia. Padahal Komisi Kepolisian Nasional telah mengusulkan 9 daftar nama yang layak untuk menjadi Kapolri. Pencalonan Kapolri secara tunggal tiba-tiba menimbulkan pro dan kontra karena Budi Gunawan terduga memiliki “rekening gendut”.

Pada Item 12 indikator *Attitude (Cognition)*, dalam pencalonan tunggal Kapolri sebanyak 69,5% responden tidak sependapat dengan pernyataan di media televisi bahwa Budi Gunawan telah lulus dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh Komisi Hukum DPR. Pada dasarnya kata *Fit* dan *Proper* adalah kata sifat yang memiliki arti yang sama, yaitu pantas, patut, atau layak. Sehingga secara sederhana, *Fit and proper test* sebagai tes kepatutan, kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kapolri.

KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka pada 13 Januari 2015 namun pada tanggal 14 Januari 2015 Budi Gunawan dinyatakan telah lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR meskipun masih dalam catatan merah KPK. DPR Fraksi PDIP menyatakan menghormati asas praduga tak bersalah meskipun Budi Gunawan dinyatakan sebagai tersangka namun DPR tetap melakukan *Fit and Proper test*. Dari seluruh fraksi di DPR, hanya fraksi Partai Demokrat yang tegas menolak dilanjutkannya proses uji kelayakan dan kepatutan Budi Gunawan.

3. Opini Masyarakat Indikator *Perception*

Pada Item 13 indikator *perception*, responden menyatakan tidak setuju dengan pencalonan tunggal Kapolri tanpa melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan Analisis

Keuangan (PPATK) dengan persentasi 67,8%. Penglibatan KPK dan PPATK diharapkan masyarakat agar calon Kapolri maupun calon Menteri bersih dari keterlibatan korupsi dan rekening tidak wajar.

Item soal 12 dan 13 yaitu *fit and proper test* erat kaitannya dengan penglibatan KPK dan PPATK dalam memilih Calon Kapolri. *Fit and Proper test* merupakan sarana yang tepat untuk menutup celah agar calon Kapolri yang akan di uji benar-benar layak bersih dari tindak pidana korupsi. PPATK merupakan langkah dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Di dalam pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 48 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, dijelaskan bahwa PPATK memiliki tugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Keterlibatan PPATK dan KPK di dalam proses pemilihan Kapolri memang tidak diatur di dalam undang-undang, namun bukan berarti melibatkan kedua institusi tersebut melanggar undang-undang.

Pasal 4 Perpres No. 48 tahun 2012 tersebut, fungsi PPATK dijabarkan antara lain yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang, pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada Item 15 indikator *perception*, sebanyak 65,2% atau 227 responden menyatakan setuju dengan pemberitaan di media televisi yang menyatakan calon tunggal Kapolri Budi Gunawan karena merupakan mantan Ajudan Presiden Megawati. Pernyataan ini diperkuat bahwa faktor pertama karena kedekatan Budi Gunawan dengan Megawati sehingga mampu mengalahkan empat calon yang diusulkan oleh Komisi Kepolisian Nasional. (Sumber: Tempo.com edisi 10 Januari 2015).

Beberapa media televisi menggiring opini masyarakat dengan menyajikan berita yang menampilkan jejak Budi Gunawan yang dikaitkan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yaitu Jusuf Kalla, Surya Paloh dan Megawati. Sehingga menguatkan pemikiran masyarakat jika Budi Gunawan dipilih sebagai calon tunggal karena dekat dengan Megawati.

Pada Item 16 indikator *perception*, tindakan KPK yang mengatakan Budi Gunawan terlibat Tindak Pidana Korupsi saat terpilih sebagai calon tunggal, padahal kasus

tersebut sudah lama namun baru diungkapkan ke media dianggap benar oleh responden sebanyak 65,2%. Kronologis penyelidikan dan penyidikan KPK terhadap Budi Gunawan sebagai tersangka bukan secara tiba-tiba bahkan jauh-jauh hari KPK sudah menjelaskan kepada Joko Widodo bahwa Budi Gunawan adalah pejabat tinggi negara yang terindikasi masalah hukum. (Sumber: Kompas.com edisi 10 Februari 2015)

Salah satu bentuk nyata dari pengaruh media terhadap masyarakat adalah munculnya pendapat umum atau opini publik. Pada akhirnya media dan publik yang kemudian akan membentuk suatu opini publik terhadap suatu hal. Ketika masyarakat lebih memihak kepada KPK maka media pun semakin mengagendakan bahwa masyarakat harus mendukung KPK dengan kata lain media harus menggiring opini publik agar opini tersebut semakin kuat. Sehingga apa yang diberitakan media terhadap KPK secara tidak langsung masyarakat akan pro atau setuju terhadap KPK.

Pada Item 17 indikator *perception*, jawaban responden setuju dengan tindakan KPK yang melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung sebanyak 65,2% atau 227 orang. Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan praperadilan Budi Gunawan keliru yang membatalkan penetapan status tersangka Budi Gunawan oleh KPK sehingga status penyidikan diturunkan lagi menjadi penyelidikan. Setelah status penyidikan, kalau KPK menilai lebih cepat disidik

oleh Kejaksaan Agung maka dapat dilimpahkan.

Pada Item 18 indikator *perception*, responden tidak setuju dengan Tindakan Partai politik seperti PDIP dan Nasdem yang menyalahkan KPK dalam kasus Budi Gunawan sebanyak 77,6%. Keputusan sidang paripurna didukung Delapan Fraksi yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PKS, PKB, Nasdem, Hanura dan PPP sangat mendukung pencalonan tunggal Kapolri sehingga KPK dianggap salah ketika menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Tindakan partai politik yang pro terhadap Budi Gunawan menyebutkan jika KPK salah, begitu pula dengan pimpinan partai politik yang merupakan pemilik media yang memberitakan jika tindakan KPK terhadap Budi Gunawan salah.

Pada item 19 indikator *perception*, sebanyak 71,3% atau 248 responden menyatakan sependapat dengan kritik publik bahwa presiden Joko Widodo harus melibatkan KPK dalam setiap memilih calon menteri dan Kandidat Kapolri.

Pada Item 20 indikator *perception*, sebanyak 52,9% responden menyatakan setuju dengan kritik publik bahwa presiden didesak untuk mengusulkan calon Kapolri baru meskipun Budi Gunawan dinyatakan tidak bersalah dipeperadilan. Namun tindakan Presiden Joko Widodo dinyatakan tegas untuk menghentikan pelantikan Budi Gunawan agar menghindari permasalahan yang semakin memanas dan segera mencari pengganti Budi Gunawan. Pada dasarnya masyarakat menginginkan pemerintahan

yang bersih dan benarbenar telah lulus uji kelayakan dan Keputusan. Selain itu masyarakat menganggap tindakan Joko Widodo dalam memilih calon tunggal Kapolri terlalu terburu-buru padahal masih ada 9 nama yang diusulkan Kompolnas.

Dalam teori *Priming* dimana media massa berfokus pada sebagian isu dan tidak pada isu lainnya. Selain itu teori ini juga menjelaskan bahwa media mendorong terbentuknya pikiran yang terhubung dengan apa yang ditampilkan di media itu sendiri. Ketika media televisi menampilkan nama-nama calon Kapolri yang diusulkan Kompolnas secara otomatis akan muncul pemikiran-pemikiran dari masyarakat untuk segera mencari pengganti Budi Gunawan.

Berdasarkan teori *Spiral Of silent*, Noelle-Neuman dalam buku Teori Komunikasi (2005) mendefinisikan opini publik sebagai suatu sikap atau perilaku yang dikemukakan seseorang di depan publik jika ia tidak ingin dirinya terisolasi dalam wilayah perubahan. Sikap yang ditunjukkan seseorang tanpa bahaya isolasi terhadap dirinya.

Opini publik mengacu pada suatu persamaan bersama dari suatu populasi atas suatu masalah tertentu.

Penerimaan atau pendapat masyarakat sebagai akibat kuatnya kecenderungan orang-orang sekitarnya. Banyak orang yang tidak mengemukakan pandangannya dan memilih diam dari pada membicarakan atau membahas pandangannya. Noelle-neumann menyebut situasi tersebut sebagai spiral keheningan yang terjadi ketika orang mengemukakan opininya karena merasa pandangannya mewakili pandangan

populer, sedangkan mereka yang merasa opininya tidak mewakili pandangan populer cenderung memilih diam.

Opini publik sesuai dengan kemauan banyak orang. Opini publik cenderung sesuai dengan kemauan banyak orang karena itu, banyak orang berlomba memanfaatkan opini publik sebagai bahan argumentasi atas berbagai keputusan. Dalam alam demokrasi, kebenaran normatif dapat digeser oleh kebenaran menurut "orang banyak". Keputusan yang didasarkan pada dominasi opini publik belum tentu selaras dengan norma dan etika sosial yang berlaku. (Helena Ollie dan Novi Erlita, 2011:18-21).

Peran media untuk menyebarluaskan opini publik yang menghasilkan pendapat atau pandangan yang dominan. Individu dalam hal menyampaikan pandangannya akan bergantung pada pandangan yang dominan, sedangkan media cenderung memberitakan pandangan yang terungkap.

Pada pemberitaan persetujuan KPK dan POLRI di media televisi, masyarakat menyatakan salah jika Pencalonan Budi Gunawan dipilih oleh presiden tanpa melibatkan KPK dan PPATK. Selain itu masyarakat menilai tindakan Pemerintah terlalu gegabah dalam memilih Budi Gunawan sebagai calon tunggal padahal Komisi Kepolisian Nasional mengusulkan 9 nama calon.

Simpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya,

maka penelitian mengenai "Opini masyarakat tentang pemberitaan persetujuan KPK dan POLRI di media televisi pada kasus pencalonan tunggal Kepolisian Republik Indonesia Budi Gunawan" dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Opini masyarakat dalam indikator *Belief*, mayoritas responden sebanyak 225 atau 64,5% percaya terhadap informasi pemberitaan persetujuan KPK dan POLRI di media televisi dan kinerja kedua lembaga hukum KPK dan POLRI.
2. Opini masyarakat dalam indikator *Attitude*, mayoritas responden sebanyak 177 atau 51% menyatakan sikap positif terhadap pemberitaan pencalonan tunggal Kepolisian Republik Indonesia Budi Gunawan.
3. Opini masyarakat indikator *Perception*, mayoritas responden sebanyak 189 atau 54,3% menyatakan tidak setuju dengan pencalonan tunggal Kepolisian Republik Indonesia tanpa melibatkan KPK-PPATK dan pemberitaan di media televisi yang menyatakan Budi Gunawan mantan ajudan Megawati.

Saran

Merujuk pada hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran yaitu :

1. Media televisi dalam menyajikan informasi harus akurat dan berimbang tanpa memihak kepentingan politik tertentu.
2. Media sebagai alat penyampaian pesan haruslah selalu menjaga objektivitas dalam menyampaikan pemberitaan dengan menampilkan berita sesuai dengan fakta.

3. Masyarakat lebih selektif dalam memilih informasi mana yang layak untuk dikonsumsi dan lebih jeli dalam memaknai setiap informasi yang disajikan media dalam sebuah berita politik

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Edisi Revisi V*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bns Welling Sedia,. 2010. *Jurnalistik*. Jakarta : Erlangga
- Bungin Burhan ,. 2008. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Idrus Muhammad,. 2009. *Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Erlangga.
- Masyudi Sipak,. 2012. *Meningkatkan Profesionalisme Insan Jurnalistik Televisi*. Banjarmasin
- Morrisan,. 2010. *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Jakarta: Kencana
- Nurudin,. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Olli Helena, Erlita Novi,. 2011. *Opini Publik*. Edisi Kedua. Jakarta : Indeks.
- Putra R. Masri Sareb,. 2006. *Teknik Menulis Berita dan Feature*. Jakarta : Indeks
- Rachmadi F,. 1990. *Perbandingan Sistem Pers*. Jakarta : PT Gramedia.
- Ruslan Rosady,. 2006. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- S Djuarsa Sendjaja, Dkk. 2005. *Teori Komunikasi*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Sarwani,. 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono,. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sumadiria AS Haris ,. 2005. *Jurnalistik Indonesia*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- T Atmadi,. 1985. *Bunga Rampai*. Jakarta : PS. Jurnal
- Hamdan. 2014 “Analisis Framing Berita Perseteruan KPK dan POLRI di Media KOMPAS.COM dan VIVANEWS.COM”.
ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id. 15 Juni 2014

Skripsi

- Thomas Abdi H. Tarigan,. 2009. *Pendapat Masyarakat Tentang Pemberitaan Kasus Mutilasi dan Pembunuhan Berantai Very Idam*

Henyansah. Universitas Sumatera Utara.

Esy Nurtias Tuti,. 2012. *Opini Pendengar Terhadap Progran Acara Dangdut Ponorogan di Radio Duta Nusantara Ponorogo.* Universitas Muhamadiyah Ponorogo.

Icha Marina Elliza,. 2009 *Opini siswa SMA terhadap citra KPK (Studi Deskriptif Opini Siswa SMA Negeri 3 Medan terhadap citra Komisi Pemberantasan Korups.).* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Alien Chairina Husni,. 2013 *Opini Publik di Media Sosial Twitter (Analisi Isi Opini Kekerasan Seksual Anak) oleh.* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin. Website <http://www.bps.com>

<http://www.slideshare.net/restamadiun/undang-undang-polri-presentation>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)